

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai politik adalah wadah ataupun sarana untuk warga Negara dalam ikut serta untuk berpartisipasi mengikuti proses pengelolaan Negara. Tidak hanya itu, partai politik pula menjadi sarana partisipasi bagi jalannya politik warga dalam meningkatkan kehidupan demokrasi buat menjunjung tinggi serta mendapatkan kebebasan yang adil dan bertanggung jawab.¹ Pada saat ini partai politik menjadi suatu keharusan yang menjadi kesatuan dalam menjalankan kehidupan berpolitik yang modern dan demokratis.² Menjadi sesuatu lembaga, partai politik ini hakikatnya dimaksudkan sebagai alat untuk memobilisasi rakyat, mewakili untuk kepentingan tertentu, menjamin kebebasan berkompromi untuk berpendapat yang silih bersaing dan sebagai sarana sukses dalam kepemimpinan politik baik itu secara absah maupun damai.³

Partai politik ini secara universal dikatakan sebagai suatu kelompok yang terorganisir di mana di dalamnya terdapat anggota-anggota yang memiliki orientasi, memiliki nilai-nilai serta cita-cita yang sama. Dengan sama-sama memiliki tujuan

¹ Ramlan Subakti, *Memahami ilmu politik*, (Jakarta : PT.Grasindo, 1992), hal 120

² Rahman HI, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal 75

³ Kencana Syafie, *Ilmu politik*, (Jakarta :Rineka Cipta, 2010), hal 1

untuk memperoleh dan mendapatkan kekuasaan politik dengan melalui kekuasaan itu, elmen politik dapat melakukan kebijakan-kebijakan yang mereka buat.⁴ Sebab itu, partai politik ini dalam penafsiran modern bisa didefinisikan bagaikan kelompok ataupun organisasi yang bisa mengajukan calon-calonnya untuk dijadikan dan di calonkan menjadi pejabat publik yang kemudian diseleksi oleh rakyat sehingga dapat mengendalikan ataupun mempengaruhi dan mengontrol jalannya pemerintahan.⁵

Keberadaan dari partai politik ini bukan hanya sekedar sarana untuk warga dalam turut serta berpartisipasi politik, melainkan juga bisa berperan sebagai sarana guna mempersiapkan, menimbulkan, melahirkan seorang pemimpin politik untuk memimpin bangsa serta Negera.⁶ Dengan hal ini, partai politik menjadi perantara untuk menghubungkan ideologi sosial serta kekuatan politik terhadap kemunculan lembaga-lembaga pemerintah yang formal secara lebih meluas.⁷

Kalaupun saat ini partai politik nyatanya wajib muncul dalam kehidupan negara republik, kala kelompok bangsawan dikira tidak terdapat lagi, bukan berarti kalau khasiat partai politik jadi tidak berarti. Partai politik yang kita ketahui saat ini merupakan lembaga untuk pengendalian konflik seperti kepentingan yang terdapat pada masyarakat politik nasional. Dan partai politik merupakan lembaga yang wajib mengagregasi, wajib mengartikulasi kepentingan yang terjalin dengan warga, serta

⁴ Ramlan Subakti, *Memahami ilmu politik*, (Jakarta : PT.Grasindo, 1992), hal 148

⁵ Rahman HI, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal 79

⁶ Kencana Syafie, *Ilmu politik*, (Jakarta :Rineka Cipta, 2010), hal 9

⁷ Ramlan Subakti, *Memahami ilmu politik*, (Jakarta : PT.Grasindo, 1992), hal 149

mensosialisasikan sebuah nilai politik yang masih berlaku pada warga suatu negara yang bersangkutan.⁸ Hal ini sejalan dengan fungsi partai politik sebagai berikut:⁹

Pertama, sosialisasi politik yaitu merupakan fungsi dari proses dari mana seseorang dapat memperoleh suatu sikap dan orioentasi terhadap sebuah fenomena politik yang pada umumnya berlaku di dalam masyarakat yang di mana ia berada;

Kedua, partisipasi politik yaitu merupakan fungsi dari partai politik untuk mendorong seluruh masyarakat untuk bisa ikut serta aktif dalam partisipasi kegiatan politik;

Ketiga, komunikasi politik yaitu merupakan fungsi untuk menyalurkan berbagai pendapat serta aspirasi masyarakat untuk mengatur sedemikian rupa supaya perbedaan dan perdebatan pendapat di dalam masyarakat berkurang;

Keempat, artikulasi kepentingan yaitu merupakan fungsi untuk menyatakan dan menyampaikan (mengartikulasi) suatu kepentingan dari konsituen (masyarakat) untuk suatu badan politik serta pemerintah yang melalui sebuah kelompok yang telah mereka bentuk beserta orang lain yang sama-sama memiliki sebuah kepentingan yang sama;

Kelima, agregasi kepentingan yaitu merupakan fungsi dari partai politik yang sifatnya memadukan keseluruhan dari aspirasi yang ada didalam masyarakat yang selanjutnya dirumuskan untuk dijadikan program politik dan kemudian diusulkan

⁸ Firmanzah, *Pengelola Partai politik*, (Jakarta: yayasan obor Indonesia,2008), hal 107

⁹ Rahman HI, *Sistem Politik Indonesia*,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal 103-104

kepada setiap badan legislatif dan calon yang akan diajukan untuk jabatan-jabatan di dalam pemerintahan serta melakukan audiensi dengan sebuah kelompok kepentingan, serta menawarkan beberapa kepentingan mereka jika kelompok kepentingan tersebut mau mendukung dari calon tersebut;¹⁰

Keenam, pembuatan kebijakan yakni merupakan fungsi dari partai politik, setelah suatu partai politik menjuarai dan meraih serta dapat mempertahankan kembali kekuasaannya di dalam suatu pemerintahan yang secara konstitusional.¹¹

Sedangkan fungsi dari partai politik dalam UU No. 31, mengenai partai politik yakni sebagai sarana:

1. Pendidikan politik untuk anggota-anggotanya serta masyarakat luas supaya dapat menjadi suatu warga Negara yang bisa sadar akan suatu hak dan kewajiban di dalam suatu kehidupan bermasyarakat, dalam berbangsa serta bernegara;¹²
2. Menciptakan suatu iklim kondusif yang bertujuan untuk perekat persatuan serta kesatuan dalam suatu bangsa dalam mensejahterakan masyarakatnya;
3. Penyerap dan penghimpun serta penyalur berbagai aspirasi politik dari masyarakat baik secara konstitusional di dalam merumuskan serta

¹⁰ Rahman HI, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal 113

¹¹ Rahman HI, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal 114

¹² Firmanzah, *Pengelola Partai politik*, (Jakarta: yayasan obor Indonesia, 2008), hal 115

menetapkan suatu kebijakan Negara. Serta partisipasi politik dari WNI dengan rekrutmen politik di dalam proses pengisian suatu jabatan politik dengan melalui suatu mekanisme demokrasi yang dilakukan dengan cara memperhatikan kesetaraan serta keadilan gender.¹³

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) didirikan bertepatan pada tanggal 5 Januari 1973, merupakan hasil fusi dari politik keempat partai Islam, ialah Partai Nadhlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), serta Partai Islam Perti. Fusi ini kemudian menjadi simbol bagi kekuatan PPP, karena dapat menjadi partai yang sanggup mempersatukan bermacam fraksi serta kelompok-kelompok dalam Islam. Dengan demikian maka sangat wajar jika PPP saat ini memproklamkan diri bagaikan "Rumah Besar Umat Islam". PPP sebagai partai yang berasaskan Islam ini berketetapan hati serta berniat dengan segala kemampuannya untuk berupaya mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, ialah terwujudnya sebuah masyarakat yang adil serta makmur, rohaniyah serta jasmaniah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bersumber pada Pancasila serta UUD 1945.¹⁴

PPP awalnya didirikan oleh lima orang deklaratator yang dimana mereka ini merupakan pimpinan empat Partai Islam yang menjadi partisipan Pemilu 1971 serta

¹³ Firmanzah, *Pengelola Partai politik*, (Jakarta: yayasan obor Indonesia, 2008), hal 116

¹⁴ D Apriliasti, "Deskripsi Partai Persatuan Pembangunan," Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta . 2015. Hal 2.

seseorang pimpinan kelompok dari persatuan pembangunan, semacam fraksi dari empat partai Islam yang ada di DPR.¹⁵ Para deklarator ini diantaranya:

1. KH Idham Chalid, sebagai Ketua Umum dari PBNU (Nadhlatul Ulama);
2. H. Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, sebagai Ketua Umum dari Partai Muslimin Indonesia(Parmusi);
3. Haji Anwar Tjokroaminoto, sebagai Ketua Umum dari Partai Persatuan Islam Indonesia (PSII);
4. Haji Rusli Halil, sebagai Ketua Umum dari Partai Islam Perti; serta
5. Haji Mayskur, sebagai Ketua Kelompok dari Persatuan Pembangunan yang ada di Fraksi DPR.¹⁶

Pada akhir 1997 mulailah muncul krisis politik yang berawal dari krisis ekonomi. Legitimasi Soeharto mulai di gerogoti bahkan oleh para penyangga dan pengikut setianya. Gelombang protes dan demonstrasi dari masyarakat khususnya yang dipelopori oleh mahasiswa terus semakin membesar. Krisis politik dan ekonomi itu akhirnya memuncak pada tanggal 21 Mei 1998 ketika Soeharto menyatakan mengundurkan diri. Sejak itu maka berakhirilah rezim kekuasaan otoriter yang bercokol selama 32 tahun.¹⁷ Momentum ini sekaligus menandai lahirnya suatu era yang disebut reformasi sekaligus mengantarkan Indonesia memasuki era transisi demokrasi.¹⁸ Krisis

¹⁵ Abdul Aziz, *Politik Islam Politik Pergulatan Politik PPP Menjadi Partai Islam*, Yogyakarta: Ombak, 2014. hal 55

¹⁶ [Partai Persatuan Pembangunan - Teknologi Informasi dan Komunikasi \(ppp.or.id\)](http://ppp.or.id)

¹⁷ Kencana Syafie, *Ilmu politik*, (Jakarta :Rineka Cipta, 2010), hal 56

¹⁸ A. Effendi Choirie, *PK Politik Jalan Tengah*, (Jakarta Pustaka, 2002), hal. 167.

ekonomi yang terjadi sejak bulan-bulan terakhir tahun 1997 hingga pertengahan tahun 1998, telah berkembang luas menjadi krisis politik dan sosial. Tuntutan reformasi di segala bidang tidak dapat dihindari lagi agar masyarakat dapat keluar dari tata kehidupan Orde Baru yang jelas menyengsarakan mayoritas anggota masyarakat. Berdasarkan pada catatan sejarah Indonesia telah menjalani sejarah panjang yang sangat menentukan dengan perjuangan yang berat dan kritis. Melalui proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia melepaskan diri dari penjajahan. Selanjutnya, dimulailah upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, menyelenggarakan pemerintahan, serta pembangunan kehidupan berdasarkan kedaulatan rakyat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁹ Obor Reformasi diawali dengan gejolak rakyat menuntut perbaruan ekonomi dan politik, yang berimplikasi pada tuntutan segenap rakyat terhadap H. M. Soeharto supaya lengser dari jabatan kepresidenan, karena dianggap gagal dan tidak mampu menangani krisis ekonomi dan politik yang sedang melanda Indonesia, dan lengsernya H. M. Soeharto menandai berakhirnya kekuasaannya selama lebih dari 30 tahun, dan bersamaan dengan itu pula dimulai era baru dalam sistem perpolitikan yang dikenal dengan Era Reformasi.²⁰

Derap langkah reformasi telah membawa iklim baru bagi kehidupan masyarakat Indonesia dalam segala bidang dukungan politik yang selama ini membelenggu telah

¹⁹ AD-ART Partai Persatuan Pembangunan Tahun 2016.

²⁰ Muhammad Abbas, Jalan panjang reformasi, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), hal.1.

lumpuh tak berdaya. Akibatnya, berbagai aspirasi bermunculan untuk ‘menghirup’ udara segar kebebasan. Partai-partai yang menjadi saluran aspirasi politik bagus seakan-akan ‘bangkit’ dari kuburnya dan berupaya memperoleh hubungan legal masyarakat.²¹

Sejak runtuhnya pemerintahan Orde Baru, rakyat seperti mendapatkan angin segar untuk bernafas dan mengekspresikan hak-hak politiknya.²² Seklipun mundur Soeharto telah digantikan oleh B.J Habibie sehingga dimungkinkan pemerintahan terus berlangsung, tuntutan masyarakat untuk mewujudkan tatanan politik baru yang demokratis sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, tuntutan masyarakat itu semakin kuat karena kebanyakan masyarakat sudah berani mencabut legitimasinya terhadap pemerintahan di saat itu.²³

Fenomena di atas telah memunculkan semacam euphoria politik yang diwujudkan dalam kegairahan untuk mendirikan partai politik. Ratusan partai politik yang bermunculan sebelum akhirnya diverifikasi menjadi 48 partai.²⁴ Gairah semacam ini tampaknya merupakan manifestasi dari luapan kesumpekan politik yang tertekan

²¹ Sahar L. Hasan, dkk, *Memilih Partai Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hal. 29.

²² Firmanzah, *Pengelola Partai politik*, (Jakarta: yayasan obor Indonesia, 2008), hal 120

²³ Muhammad Abbas, *Jalan panjang reformasi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), hal.28

²⁴ Volta Djenglipanglima & Matt Al-Amim Karying. *Partai Politik Dalam Bingkai Buram Demokrasi*, Dalam Sayrifuddin dkk (ed), *Menembus Arus Prespektif Reformasi dari Lampung*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 347

sekian lama. Fenomena yang sebenarnya wajar terjadi, baik karena dorongan dari pihak masyarakat sendiri ataupun karena testimulasi oleh realitas dari luar.²⁵

Reformasi yang dihendaki oleh mahasiswa menghendaki pula adanya suatu perubahan terhadap semua tatanan termasuk bidang politik, ekonomi, dan hukum. Reformasi total merupakan suatu proses gradual yang berlangsung secara damai.²⁶

Indonesia sesudah lengsernya Soeharto, bila mengikuti teoritis yang dikemukakan oleh O'Donnell dan Schmitter memasuki fase "liberalism politik awal". Fase ini secara teoritis sebagai fase "transisi dari otoritarianisme entah menuju kemana". Menurut O'Donnell dan Schmitter transisi adalah interval antara suatu rezim politik dan rezim yang lain. Transisi dimulai proses perpecahan sebuah rezim otoritarian dan pengesahan beberapa bentuk demokrasi, atau kembalinya beberapa bentuk pemerintahan otoriter atau kemunculan suatu aktor revolusioner.²⁷ Ciri tipikal yang menandai fase transisi adalah ketika penguasa otoriter, demi alasan apapun. Memulai memodifikasi peraturan-peraturan mereka sendiri sebagai jaminan yang lebih kuat bagi hak-hak individu dan kelompok.²⁸

²⁵ Lili Romli, "Mencari Format Sistem Kepartaian Masa Depan", Jurnal Politika, No. 2, 2006, hal. 17

²⁶ Volta Djenglipanglima & Matt Al-Amim Karying. Partai Politik Dalam Bingkai Buram Demokrasi, Dalam Sayrifuddin dkk (ed), Menembus Arus Prespektif Reformasi dari Lampung, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 351.

²⁷ Volta Djenglipanglima & Matt Al-Amim Karying. Partai Politik Dalam Bingkai Buram Demokrasi, Dalam Sayrifuddin dkk (ed), Menembus Arus Prespektif Reformasi dari Lampung, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 353.

²⁸ Lili Romli, "Mencari Format Sistem Kepartaian Masa Depan", Jurnal Politika, No. 2, 2006, hal. 21-22.

PPP merupakan partai politik yang berasaskan Islam serta berlambangkan Kabah. Namun dalam perjalanannya, Partai PPP Mengalami tekanan-tekanan politik pada kekuasaan masa Orde Baru,²⁹ oleh karena itu PPP sempat menanggalkan asas-asas Islam dan beralih memakai asas-asas Negara Pancasila yang sejalan dengan sistem perpolitikan serta peratururan perundan-undangan yang berlaku semenjak tahun 1984. Pada Muktamar ke I partai PPP yang berlangsung pada tahun 1984 PPP secara formal memakai asas Pancasila serta lambang partai yang berbentuk bintang di dalam segi lima. Setelah jatuhnya masa Orde Baru ini yang diisyarati dengan lengsernya kekuasaan pemerintahan Presiden Soeharto yang bertepatan pada 21 Mei 1998 dimana ia digantikan oleh Wakil Presiden B. J. Habibie, PPP kembali memakai asas Islam serta lambang Kabah sebagai identitas jati diri dari partai PPP itu sendiri.³⁰

Secara resmi hal perpindahan dan pergantian asas Islam dan lambang Ka'bah kembali kepada bentuk semula melalui Muktamar ke IV pada akhir tahun 1998. Walaupun partai PPP kembali menjadikan asas Islam sebagai asasnya, PPP senantiasa berkomitmen untuk tetap setia menjunjung keutuhan NKRI yang bersumber kepada Pancasila.³¹ Perihal ini ditegaskan dan ditetapkan dalam Pasal ke 5 pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PPP yang diresmikan pada Muktamar ke VII di Kota Bandung pada tahun 2011 menyatakan bahwa: “Tujuan partai

²⁹ Zainal Abidin Amir, *Peta islam politik pasca Soeharto*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003), Hal. 160

³⁰ Abdul Aziz, *Politik Islam Politik Pergulatan Politik PPP Menjadi Partai Islam*, Yogyakarta: Ombak, 2014. hal 57

³¹ Abdul Aziz, *Politik Islam Politik Pergulatan Politik PPP Menjadi Partai Islam*, Yogyakarta: Ombak, 2014. hal 57.

PPP ini untuk mewujudnya masyarakat yang madani, adil dan makmur, serta sejahtera secara lahir dan batin, serta demokratis dalam wadah dan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bersumber kepada Pancasila di bawah ridha Allah Subhanahu Wata' ala.³²

PPP merupakan partai politik yang menjadi penerus estafeta bagi empat partai Islam serta menjadi wadah sebagai penyelamat terhadap aspirasi-aspirasi umat Islam, serta menjadikan kesadaran terhadap tanggung jawab para tokoh Islam serta pimpinan Partai Islam untuk bersatu, dan bahu-membahu dalam membina masyarakat supaya lebih meningkatkan keimanan serta ketaqwaannya kepada Allah Subhanahu wa Taala³³ lewat perjuangan politik. PPP sebagai partai yang berasaskan dan berideologi Islam ini berketetapan hati serta berniat dengan segala kemampuannya dalam berupaya untuk mewujudkan sebuah cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, ialah terwujudnya sebuah masyarakat yang adil dan makmur, secara rohaniah serta jasmaniah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Taala dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bersumber pada Pancasila serta UUD 1945.³⁴

³² D Apriliasti, "Deskripsi Partai Persatuan Pembangunan," Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta . 2015.Hal 5.

³³ Deni Nofriansyah,*Pluralitas Parpol Islam Dalam Era Reformasi*, Palembang : Buku Tujju.2012. hal 65.

³⁴ D Apriliasti, "Deskripsi Partai Persatuan Pembangunan," Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta . 2015.Hal 7.

Secara garis besarnya struktur dari organisasi partai PPP terdiri mulai dari dewan pimpinan serta majelis pertimbangan, yang dibentuk sesuai dengan wilayah pemerintahan yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia (NKRI) ialah:

1. Wilayah dari Partai Persatuan pembangunan itu sendiri yakni Daerah Tingkatan I; yang dipandu oleh Dewan Pimpinan Wilayah yang sering disebut (DPW), serta didampingi oleh Majelis Pertimbangan Daerah yang sering disebut (MPW);³⁵
2. Cabang dari Partai Persatuan Pembangunan itu sendiri yakni wilayah Tingkatan II ataupun wilayah yang disamakan; yang dipandu oleh Dewan Pimpinan Cabang yang sering disebut (DPC), serta didampingi oleh Majelis Pertimbangan Cabang yang sering disebut (MPC);³⁶
3. Anak cabang dari Partai Persatuan Pembangunan berada di tingkatan Kecamatan, yang dipandu oleh Pimpinan Anak Cabang yang sering disebut (PAC);
4. Ranting dari Partai Persatuan Pembangunan yang didirikan berada di Tingkatan Desa/ Kelurahan ataupun wilayah yang disamakan, yang dipimpin oleh seorang pimpinan Ranting.³⁷

³⁵ Abdul Aziz, *Politik Islam Politik Pergulatan Politik PPP Menjadi Partai Islam*, Yogyakarta: Ombak, 2014. hal 58.

³⁶ D Aprilia, "Deskripsi Partai Persatuan Pembangunan," Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta . 2015. Hal 8.

³⁷ Zainal Abidin Amir, *Peta islam politik pasca Soeharto*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003) ,Hal.174

Seperti yang tercantum dalam Bab IX pasal 23 Anggaran Dasar PPP, DPP memiliki kewenangan atas sepuluh persoalan disamping itu, DPP dapat menjalankan kewenangan yang lainnya yang telah diberikan dan ditetapkan melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART).³⁸ Di antara kewenangan-kewenangan DPP yakni untuk menetapkan kebijakan secara umum yang sesuai pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) yang telah ditentukan, sesuai keputusan Mukhtar dan Keputusan Musyawarah Kerja Nasional (KMKKN) dan ketentuan lainnya;³⁹ serta menetapkan bagian personalia anggota Majelis Pertimbangan Pusat atau yang sering dikenal (MPP) dan anggota dari Majelis Pakar Pusat dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh usulan dari pimpinan Majelis yang bersangkutan; serta berhak menetapkan dan menyusun susunan/personalia dari Pimpinan Fraksi Persatuan Pembangunan yang berada di MPR/DPR, dengan memperhatikan aspirasi-aspirasi anggota Fraksi serta memberikan garis ketentuan kebijakan dan memberikan petunjuk kepada Fraksi persatuan Pembangunan di lembaga tersebut.⁴⁰ DPP juga berwenang untuk membatalkan, meluruskan dan memperbaiki suatu keputusan yang diambil oleh Fraksi Persatuan Pembangunan di MPR/DPR-RI serta kepemimpinan partai di tingkat yang lebih rendah, setelah mendengar pertimbangan dari Majelis Pertimbangan Pusat keadaan di mana DPP

³⁸ D Apriliasti, "Deskripsi Partai Persatuan Pembangunan," Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta . 2015.Hal 10.

³⁹ Abdul Aziz, *Politik Islam Politik Pergulatan Politik PPP Menjadi Partai Islam*, Yogyakarta: Ombak.2014. hal 60.

⁴⁰ Abdul Aziz, *Politik Islam Politik Pergulatan Politik PPP Menjadi Partai Islam*, Yogyakarta: Ombak.2014. hal 63.

memandang telah terjadi kemacetan kepemimpinan partai di tingkat Wilayah/Cabang, ia dapat mengambil prakarsa untuk menyelenggarakan Musyawarah Wilayah/Cabang luar biasa. Poin terakhir ini membedakan PPP dari partai-partai lain yang dikaji oleh studi ini.⁴¹ Ketika menghadapi permasalahan yang sama, partai-partai Islam lainnya memberikan kewenangan untuk menggelar Musyawarah Wilayah/Cabang luar biasa kepada DPW dan DPC yang bersangkutan, tidak diambil alih oleh DPP.⁴²

Pendirian PPP tidak hanya terjadi dilingkup nasional saja, melainkan diikuti dengan pendirian diberbagai daerah salah satunya Tasikmalaya, PPP di Tasikmalaya sebenarnya sudah ada berdiri jauh sebelum wilayah ini terpecah menjadi dua wilayah administratif, serta partai yang berlambangkan ka'bah ini berhasil dan selalu menjadi lumbung suara disetiap pemilu di Tasikmalaya baik itu dalam lingkup Kabupaten maupun Kota.⁴³

Melihat perkembangan organisasi PPP Tasikmalaya yang merupakan basis lumbung suara di Tasikmalaya dari masa Reformasi hingga sekarang sangat penting untuk diteliti, maka dari itu layak diteliti dengan judul **“Perkembangan Organisasi Partai Persatuan Pembangunan di Kota Tasikmalaya 2001-2018”**

⁴¹ D Apriliasti, “Deskripsi Partai Persatuan Pembangunan,” Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta . 2015.Hal 10.

⁴² Zainal Abidin Amir, *Peta islam politik pasca Soeharto*, (Jakarta: Pustaka LP3ES,2003), Hal.175.

⁴³ Hendra Gunawan Subhan Agung, “Studi Dimensi Systemness Dan Dimensi Reification Dalam Pelembagaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Tasikmalaya Pasca Reformasi,” 2006. Hal 3.

B. Rumusan Masalah

Dari pendahuluan di atas untuk membuat sistematika penulisan dibuat rumusan masalah berikut rumusan masalahnya:

1. Bagaimana Sejarah Organisasi Partai Persatuan Pembangunan di Kota Tasikmalaya?
2. Bagaimana Perkembangan organisasi PPP di Kota Tasikmalaya 2001-2018?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas untuk membuat sistematika penulisan maka di dapat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejarah organisasi PPP di Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui perkembangan organisasi PPP di Kota Tasikmalaya 2001-2018.

D. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan sebuah kajian yang dilakukan serta memiliki tujuan untuk memperoleh gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan diajukan dengan melihat penelitian sejenis yang sebelumnya sudah pernah dilakukan

oleh para peneliti terdahulu, sehingga tidak terdapat pengulangan kata ataupun informasi yang sekiranya tidak perlu yang bersifat mubazir.⁴⁴

Pada sub bab bagian ini penulis akan memaparkan berbagai tinjauan atas beberapa hasil penelitian ilmiah sebelumnya serta terhadap beberapa konsep-konsep yang memiliki keterkaitan hubungan dengan penelitian ini. Guna mendukung dan menunjang jalannya penelitian yang berjudul **“Perkembangan Organisasi Partai Persatuan Pembangunan Di Kota Tasikmalaya 2001-2018”**, maka dengan itu penulis melakukan beberapa tinjauan pustaka terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan tema yang sedang penulis angkat.

Studi Pustaka yang berjudul **“Pengaruh Kebijakan Pemimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Terhadap Peningkatan Kinerja kader Di Kota Bandung.”** Karya Acep Bagja Achmad NK, di dalam Skripsinya pada tahun 2013 pada jurusan Sejarah dan Peradaban Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini menggambarkan bagaimana pengaruh-pengaruh dari kebijakan-kebijakan para pemimpin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap para kadernya di Kota Bandung.⁴⁵ Metode yang digunakannya menggunakan metode penelitian sejarah, yaitu diantaranya heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi

⁴⁴ Abdullah Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), Hal.182.

⁴⁵ Acep Bagja Achmad NK, Skripsi, Pengaruh kebijakan Pemimpin Partai persatuan pembangunan (PPP) Terhadap peningkatan Kinerja Kader di Kota Bandung, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013).

kesamaan skripsi terletak pada rumusan masalah yang hanya dibedakan oleh kondisi letak geografis antara Bandung dengan Tasikmalaya.

Studi Pustaka yang berjudul “Pemberitaan Dualisme Kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan PPP Dalam Bingkai SKH Kompas” Karya Muhamad Azis Soleh, di dalam skripsinya pada tahun 2015 pada jurusan sejarah dan Peradaban Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini mengkaji bagaimana Surat Kabar Harian Kompas membingkai semua pemberitaan mengenai dualisme kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan pada edisi oktober 2014. Penelitian yang ditulis oleh Muhamad Azis Soleh ini lebih menekankan pada bagaimana analisis framing itu atau yang sering kita kenal sebagai analisis bingkai yakni, pembedaan dalam media yang dilakukan melalui surat kabar terhadap suatu kejadian peristiwa yang nantinya akan disajikan kepada khalayak seperti pada contoh kasus konflik yang terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Analisis data di dalam data, dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan metode-metode analisis framing.⁴⁶ Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian sejarah, yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Kesamaan skripsi terletak pada rumusan masalah yang hanya dibedakan oleh kondisi letak geografis antara Yogyakarta dengan Tasikmalaya.

⁴⁶ Muhammad Azis Soleh, Pemberitaan Dualisme Kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan PPP Dalam Bingkai SKH Kompas), Skripsi diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Studi Pustaka yang berjudul “Sikap Politik Partai Persatuan Pembangunan dalam Suksesi Kepemimpinan Negara pada Pemilu 2014”. Karya Ade Hikmatul Fauziah, di dalam skripsinya pada tahun 2015 pada jurusan Sejarah dan Peradaban Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini lebih menggambarkan arah dan sikap politik dari Partai PPP dalam hal suksesi kepemimpinan yang terjadi pada pemilu tahun 2014. Dan sesekali penelitian ini menyinggung tentang konflik dualism kepemimpinan yang sedang terjadi di dalam tubuh partai PPP⁴⁷. Metode penelitian yang digunakannya pun menggunakan metode penelitian sejarah, yaitu diantaranya heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Kesamaan skripsi terletak pada rumusan masalah yang hanya dibedakan oleh kondisi letak geografis antara Jakarta Dengan Tasikmalaya.

Selain melakukan kajian pustaka pada skripsi penulis juga melakukan kajian pustaka pada salah satu buku yang membahas tentang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berjudul “politik Islam Politik: Pergulatan Politik PPP menjadi Partai Islam” buku ini disusun oleh Abdul Aziz dimana beliau merupakan ketua DPC PPP Rembang. Buku ini dalam bahasanya memuat tentang peralihan ideologi paratai PPP dari pancasila kembali menjadi ideologi Islam. Serta membahas juga konsekuensi PPP kembali menjadi partai Islam yang dipandang dari segi etika politik ataupun sosial.⁴⁸

⁴⁷ Ade Hikmatul Fauziah, Skripsi, Sikap PPP Dalam Suksesi Kepemimpinan Negara pada Pemilu 2014, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

⁴⁸ Abdul Azis, Politik Islam Politik: pergulatan Politik PPP Menjadi Partai Islam (Yogyakarta: Tiara Wacana,2006).

Sedangkan buku lainnya yang membahas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah “Peta Islam Politik Pasca Soeharto” yang disusun oleh Zainal Abidin Amir. Dalam buku ini dibahas mengenai bagaimana sejarah berdirinya PPP, perkembangannya hingga struktur organisasinya.⁴⁹ Adapun jurnal yang penulis gunakan dalam studi pustaka ini yakni jurnal yang berjudul “Studi Dimensi Systemness dan Dimensi Reification dalam Pelembagaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Tasikmalaya Pasca Reformasi” jurnal ini dibuat oleh Subhan Agung dan Hendra Gunawan, pada jurnal ini membahas tentang berdirinya Partai persatuan Pembangunan (PPP), perkembangan PPP di Tasikmalaya hingga kepada perolehan suara yang di dapatkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Tasikmalaya.⁵⁰

E. Metode Penelitian

Langkah-langkah yang penulis gunakan di dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode sejarah. Dimana Metode sejarah ini ialah suatu proses menguji serta menganalisa baik secara kritis suatu rekaman serta peninggalan-peninggalan dari masa lalu melalui sumber-sumber ataupun informasi yang ditemui di lapangan.⁵¹ Dalam metode penelitian sejarah ini mencakup empat langkah berikut ini, ialah heuristik,

⁴⁹ Zainal Abidin Amir, *Peta islam politik pasca Soeharto*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003)

⁵⁰ Hendra Gunawan, Subhan Agung, “Studi Dimensi Systemness Dan Dimensi Reification Dalam Pelembagaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Tasikmalaya Pasca Reformasi.” 2006.

⁵¹ Louis Gottschalk. *Mengerti Sejava*. (Jakarta: Yayasan Universitas Indonesia. 1975). hlm. 32.

kritik, interpretasi serta historiografi. Adapun Penjelasan secara singkatnya bisa dijabarkan sebagai berikut:

Tahapan awal merupakan tahapan pengumpulan informasi ataupun sumber sejarah. Sedangkan tahapan kedua merupakan tahapan kritik ataupun sering disebut sebagai tahapan memilah atau memilih sumber informasi yang diperoleh oleh penulis. Tahapan ketiga merupakan interpretasi ataupun pemberian arti pada sumber-sumber sejarah yang telah dikritisi oleh penulis. Tahapan keempat merupakan historiografi ialah tahapan melaksanakan rekonstruksi dengan melaksanakan penyusunan sejarah bersumber pada sumber informasi yang sudah dikumpulkan serta dikritisi dan sudah melalui tahapan interpretasi tadi.⁵²

1. Heuristik

Secara bahasa heuristik menurut Notosusanto, berasal dari bahasa Yunani yakni heuriskein, yang sama-sama memiliki arti yang sama dengan *to find* yang artinya tidak hanya sekedar menemukan ialah mencari dulu. Sebaliknya heuristik secara istilah, tahapan heuristik ialah tahapan yang ditunjukkan pada penjajakan, pencarian, serta pengumpulan sumber yang diteliti, baik yang ada dilokasi lapangan penelitian, baik berupa penemuan benda ataupun sumber lisan. Pada tahap awal ini peneliti berupaya mencari serta mengumpulkan sumber-sumber yang berhubungan dan memiliki keterkaitan dengan topik yang hendak dibahas.⁵³

⁵² Sulasaman. *Metodologi Penelitian Sejarah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2014). hlm. 90.

⁵³ Sulasaman. *Metodologi Penelitian Sejarah...*, hlm. 93.

Dalam penelitian ini yang berjudul “Perkembangan Organisasi PPP di Kota Tasikmalaya 2001-2018” penulis mencoba untuk mengumpulkan beberapa sumber-sumber yang diperoleh dari berbagai perpustakaan-perpustakaan serta lembaga kearsipan untuk menunjang penelitian. Dalam tahap mencari sumber-sumber yang dibutuhkan ini penulis mendatangi berbagai perpustakaan seperti perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, serta mendatangi juga perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora, kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Bapusipda) Provinsi Jawa Barat, Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta mengunjungi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) dan kantor DPC PPP Kota Tasikmalaya. Adapun sumber-sumber yang telah berhasil dikumpulkan oleh penulis diantaranya sebagai berikut:

a. Sumber Tertulis

1) Arsip / Dokumen

- a) Himpunan Data Hasil pemilu & Presentasinya yang di capai oleh tiap-tiap organisasi Peserta pemilu di Kota Tasikmalaya 2004, 2009, 2014. Arsip Nasional Republik Indonesia.
- b) Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 di Kota Tasikmalaya. Arsip Nasional Republik Indonesia.
- c) Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 di Kota Tasikmalaya. Arsip Nasional Republik Indonesia.

- d) Laporan I Penyelenggaraan pemilihan Umum Tahun 2014 di Kota Tasikmalaya. Arsip Nasional Republik Indonesia.
- e) Laporan II Penyelenggaraan pemilihan Umum Tahun 2014 di Kota Tasikmalaya. Arsip Nasional Republik Indonesia.
- f) Arsip Sejarah berdirinya Partai Persatuan pembangunan
- g) Arsip Sejarah berdirinya Partai persatuan Pembangunan di Tasikmalaya
- h) Akta pendirian PPP
- i) Visi Misi PPP (AD-ART PPP)
- j) SK Menhukam DPP PPP
- k) SK DPC PPP

2) Koran

- a) Koran Harian Umum, Radar Tasikmalaya edisi Jum'at 13 Mei 2016.
"Tasik Lumbung Suara PPP"
- b) Koran Harian Umum, Pikiran Rakyat edisi Jum'at 19 Februari 2016.
"PPP Optimis Menang Lagi di Pilkada"
- c) Koran Harian Umum, Tempo edisi Selasa 26 April 2016 "Setelah Islah di Tasikmalaya PPP Masih Dua Kubu"
- d) Koran Harian Umum, Radar Tasikmalaya edisi Selasa 10 Mei 2016.
"PPP Kota Tasik Bergejolak."
- e) Koran Harian Umum, Radar Tasikmalaya edisi Kamis 12 Mei 2016.
"PAC PPP: Yang Sudah keluar jangan diberi Ruang"

- f) Koran Harian Umum, Pikiran Rakyat edisi Senin 15 Mei 2016. “Otong: Kami Satu PPP”
- g) Koran Harian Umum, Pikiran Rakyat edisi Senin 15 Mei 2016. “Dicky Chandra Tegaskan Tidak akan Ngemis Jabatan.”
- h) Koran Harian Umum, pikiran Rakyat edisi Selasa 08 September 2009. “ PPP Optimis Kuasai Kursi DPRD Kota Tasikmalaya”
- i) Koran Harian Umum, Radar Tasikmalaya edisi Minggu 25 April 2004 “Bagaimana PPP Berkampanye di Tasikmalaya?”
- j) Koran Harian Umum, Radar Tasikmalaya edisi Kamis 29 April 2004 “Gejolak di Tubuh DPC PPP Kota Tasikmalaya”

3) Majalah

- a) Persada Utama. “*Sekretaris DPC PPP Kota Tasikmalaya Bertemu Hamzah Haz*” edisi 2 Maret 2001.
- b) Persada Utama. “*PPP Kota Tasikmalaya Resmi Berpisah Dengan PPP Kab.Tasikmalaya Sebagai Perwujudan pemisahan Wilayah*” edisi 10 Maret 2001.
- c) Persada Utama. “*Hamzah Haz Tegaskan PPP di Kota Tasikmalaya bisa berkembang setelah lepas dari Kabupaten Tasikmalaya.*” edisi 12 Maret 2001.

4) Buku

- a) Kencana Syafie, 2010, *Ilmu Politik*, Jakarta PT.Rineka Cipta.
- b) Ramlan Subakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo.

- c) Firmanzah, 2008, *Pengelola Partai Politik*, Jakarta: Yayasan obor Indonesia.
- d) Rahman HI, 2007, *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- e) Zainal Abidin Amir, 2003, *Peta Islam Politik Pasca Soeharto*, Jakarta: Pustaka LP3ES.
- f) Abdul Aziz, 2014, *Politik Islam Politik Pergulatan Politik PPP Menjadi Partai Islam*, Yogyakarta: Ombak.
- g) Deni Nofriansyah, 2012, *Pluralitas Parpol Islam Dalam Era Reformasi*, Palembang: Buku Tujju.
- h) Luky Sandra Amalia, 2017, *Partai Dan Sistem Kepartaian Pasca Reformasi*, Jakarta: Pustaka pelajar.
- i) Syamssudin Haris, 2015, *Partai Pemilu dan Parlemen Pasca Reformasi*, Jakarta: Buku Obor.
- j) Moch.Nurhasim, 2016, *Masa Depan Partai Islam Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- k) Asep Nurjaman, 2015, *Sistem Kepartaian di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES.
- l) Aisyah Putri Budiarti, 2015, *Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi*, Jakarta: Buku Obor.

b. Sumber Lisan

- 1) H.Deddy SE.Moh Romli Sebagai Sekertaris DPC PPP Kota Tasikmalaya Periode 2001-2004.

- 2) Budi Budiman sebagai Ketua DPC PPP Kota Tasikmalaya Periode 2010-2019;
- 3) Zenzen Jaenudin sebagai Ketua DPC PPP Kota Tasikmalaya Periode 2019-2020;
- 4) KH.Udin Sa'dudin Sebagai Ketua Majelis Syariah DPC PPP Tasikmalaya
- 5) Asep Rizal Ashari Sebagai Wakil sekretaris Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi;
- 6) Endi Sagita Sebagai Admin dan Pengelola pangkalan Data DPC PPP Tasikmalaya;
- 7) Ramdhani Mun'im Sebagai Ketua Pemenangan Pemilu Dapil I Tasikmalaya;
- 8) Abad Badrudin Sebagai wakil Ketua DPC PPP Tasikmalaya 2018;
- 9) U.Mulyana Sebagai Sekertaris DPC PPP Tasikmalaya 2018;
- 10) Diding Solihudin Sebagai Ketua Bapilu DPC PPP Tasikmalaya;
- 11) Daud sebagai Staff DPC PPP Tasikmalaya.

c. Sumber Benda

- 1) Gambar Kantor DPC PPP Tasikmalaya, 2019;
- 2) Gambar Kegiatan LP2 DPC PPP Tasikmalaya, 2018;
- 3) Gambar Kegiatan Doa Bersama Ketua DPC PPP Tasikmalaya, 2018;
- 4) Gambar Kegiatan kampanye Partai Persatuan Pembangunan di Tasikmalaya, 2018;
- 5) Gambar Kegiatan Rapat Anggota DPC PPP Tasikmalaya, 2019;

- 6) Gambar kegiatan LP2 DPC PPP Tasikmalaya, 2019;
- 7) Gambar Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kantor DPC PPP Tasikmalaya, 2019.

2. Kritik

Dalam penelitian metode sejarah, kritik merupakan tahap kedua setelah tahap pengumpulan informasi. Pada tahapan ini ialah tahap penyeleksian dan penyaringan terhadap sumber-sumber yang sudah kita miliki di lapangan, baik berbentuk sumber-sumber tertulis, lisan, ataupun benda sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Seorang sejarawan dalam melakukan tahapan merekonstruksi sejarah wajib menguji sebagian sumber supaya memperoleh suatu kebenaran yang bisa dipertanggung jawabkan. Pada tahapan kedua dalam kritik ini terbagi menjadi dua, ialah kritik ekstern dan kritik intern.⁵⁴

Kritik ekstern ini bertujuan untuk menguji otentisitas ataupun keaslian dari suatu sumber. Aspek ekstern ini mempersoalkan apakah suatu sumber itu asli atau palsu sehingga disini seorang sejarawan dituntut untuk dapat menguji mengenai keakuratan dari dokumen sejarah tersebut, mislanya seperti pada waktu pembuatan dokumen itu sendiri, bahan ataupun materi dokumen, pada aspek ekstern ini harus mampu menjawab, apakah sumber tersebut merupakan sumber-sumber yang dikehendaki (otentisitas), serta apakah sumber tersebut asli atau turunan

⁵⁴ Sulasaman. *Metodologi Penelitian Sejarah...*, hlm.101.

(orisinilitas), serta apakah sumber tersebut masih dalam keadaan utuh atau telah diganti (soal integritas).⁵⁵

Sebaliknya kritik intern ini bertujuan buat memperoleh sumber yang mempunyai tingkatan validitas ataupun keakuratan yang besar. Dalam hubungan kritik intern ini, menurut Louis Gottschalk “setelah seorang peneliti telah menetapkan teks yang otentik serta memastikannya apa yang benar-benar hendak dikatakan oleh pengarang, hingga sejarawan baru dapat menetapkan apa yang bisa menjadi kesaksian dari saksi. Peneliti masih harus menetapkan kesaksian itu apakah kredibel atau tidak, serta bila memang demikian, sepanjang mana.”⁵⁶

Langkah awal dalam proses kritik intern ialah harus bisa memastikan sifat sumber itu (apakah formal/ resmi ataupun tidak formal/ resmi).⁵⁷ Langkah kedua ialah menyoroti penulis terhadap sumber tersebut karena ia yang membagikan data yang diperlukan, serta harus bisa dipastikan apakah kesaksiannya bisa dipercaya. Serta langkah ketiga, menyamakan kesaksian-kesaksian dari berbagai sumber dengan cara menjajarkan kesaksian dari para saksi yang tidak berhubungan satu sama lainnya sehingga data yang diperoleh dilapangan objektif.⁵⁸

⁵⁵ Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah*, (Jogjakarta: Ombak, 2012) hlm.14-106.

⁵⁶ Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah...*, hlm. 113-115.

⁵⁷ Sulasaman. *Metodologi Penelitian Sejarah...*, hlm.102.

⁵⁸ Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah...*, hlm. 113-115.

Dalam memahami suatu konsep diatas, penulis berupaya menerapkan hal ini dengan cara semaksimal mungkin terhadap sumber yang sudah didapatkan dari lapangan, diantaranya dari sumber-sumber tersebut di peroleh sebagai berikut:

a. Sumber Tertulis

1. Arsip / Dokumen

- a) Himpunan Data Hasil Pemilu & Presentasinya yang dicapai oleh tiap-tiap organisasi peserta pemilu di Kota Tasikmalaya 2004, 2009, dan 2014. Arsip Nasional Republik Indonesia. Dalam tahap kritik ekstern dokumen tersebut merupakan dokumen yang disusun serta diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan tersimpan baik di ANRI. Arsip ini dipastikan merupakan sumber turunan. Serta dokumen tersebut sudah menggunakan ketikan Komputer. Adapun kritik secara intern dalam dokumen tersebut memang betul merupakan Himpunan Data Hasil Pemilu di Kota Tasikmalaya yang berisi pernyataan tentang Data Hasil Pemilu & Presentase yang dicapai oleh tiap-tiap organisasi peserta pemilu di Tasikmalaya dari Tahun 2004, 2009, dan 2014. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumber tersebut merupakan sumber asli. Dan sumber tersebut merupakan sumber Primer.
- b) Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 di Kota Tasikmalaya. Arsip Nasional Republik Indonesia. Dalam tahap kritik ekstern dokumen pada laporan tersebut masih dalam keadaan utuh dan

masih tersimpan baik di ANRI. Adapun kondisi kertas yang digunakan masih asli dan sudah berwarna ke kuningan serta tinta yang digunakan dalam penulisannya pun masih menggunakan jenis tinta yang awet sehingga tulisannya ini tidak mudah luntur dan masih sangat jelas terbaca dan tidak ada informasi dari sumber tersebut yang hilang. Arsip tersebut sudah menggunakan ketikan yang semi modern, sumber arsip tersebut ini dibuat pada tahun 2004 serta merupakan sumber dalam berbentuk formal. Dari segi intern arsip ini berisi tentang Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 di Kota Tasikmalaya dari mulai penyelenggaraan sampai selesai proses pemungutan suara pemilu di Kota Tasikmalaya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumber tersebut merupakan sumber asli. Dan sumber tersebut merupakan sumber Primer.

- c) Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 di Kota Tasikmalaya. Arsip Nasional Republik Indonesia. Dalam tahap kritik ekstern dokumen pada laporan tersebut masih dalam keadaan utuh dan masih tersimpan baik di ANRI. Adapun kondisi kertas yang digunakan masih asli serta tinta yang digunakan dalam penulisannya pun masih menggunakan jenis tinta yang awet sehingga tulisannya ini tidak mudah luntur dan masih sangat jelas terbaca dan tidak ada informasi dari sumber tersebut yang hilang. Arsip tersebut sudah menggunakan ketikan Komputer, sumber arsip tersebut ini dibuat pada tahun 2009 serta merupakan sumber dalam

berbentuk formal. Dari segi intern arsip ini berisi tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 di Kota Tasikmalaya dari mulai penyelenggaraan sampai selesai proses pemungutan suara pemilu di Kota Tasikmalaya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumber tersebut merupakan sumber asli. Dan sumber tersebut merupakan sumber Primer.

- d) Laporan I Penyelenggaraan pemilihan Umum Tahun 2014 di Kota Tasikmalaya. Arsip Nasional Republik Indonesia. Dalam tahap kritik ekstern dokumen pada laporan tersebut masih dalam keadaan utuh dan masih tersimpan baik di ANRI. Adapun kondisi kertas yang digunakan masih asli serta tinta yang digunakan dalam penulisannya pun masih menggunakan jenis tinta yang awet sehingga tulisannya ini tidak mudah luntur dan masih sangat jelas terbaca dan tidak ada informasi dari sumber tersebut yang hilang. Arsip tersebut sudah menggunakan ketikan Komputer, sumber arsip tersebut ini dibuat pada tahun 2014 serta merupakan sumber dalam berbentuk formal, karena dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dari segi internal arsip tersebut berisi tentang Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pada Tahun 2014 di Kota Tasikmalaya dari mulai awal persiapan pemilu hingga akhir pemungutan suara dalam pemilu di Kota Tasikmalaya pada Tahun 2014. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumber tersebut merupakan sumber asli. Dan sumber tersebut merupakan sumber Primer.

- e) Laporan II Penyelenggaraan pemilihan Umum Tahun 2014 di Kota Tasikmalaya. Arsip Nasional Republik Indonesia. Dalam tahap kritik ekstern dokumen pada laporan tersebut masih dalam keadaan utuh dan masih tersimpan baik di ANRI. Adapun kondisi kertas yang digunakan masih asli serta tinta yang digunakan dalam penulisannya pun masih menggunakan jenis tinta yang awet sehingga tulisannya ini tidak mudah luntur dan masih sangat jelas terbaca dan tidak ada informasi dari sumber tersebut yang hilang. Arsip tersebut sudah menggunakan ketikan Komputer, sumber arsip tersebut ini dibuat pada tahun 2014 serta merupakan sumber dalam berbentuk formal, karena dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dari segi internal arsip tersebut berisi tentang Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pada Tahun 2014 di Kota Tasikmalaya dari mulai awal persiapan pemilu hingga akhir pemungutan suara dalam pemilu di Kota Tasikmalaya pada Tahun 2014. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumber tersebut merupakan sumber asli. Dan sumber tersebut merupakan sumber Primer.
- f) Arsip Sejarah berdirinya Partai Persatuan Pembangunan secara eksternal arsip tersebut masih utuh dan kini sudah banyak di konversi ke bentuk digital guna menghindari kerusakan, arsip tersebut di scan dalam bentuk pdf dan masih terlihat jelas tidak ada tulisan yang hilang. Dari segi internal arsip tersebut berisi tentang sejarah berdirinya Partai Persatuan Pembangunan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa

sumber tersebut merupakan sumber asli. Dan sumber tersebut merupakan sumber Primer.

- g) Arsip Sejarah berdirinya Partai persatuan pembangunan di Tasikmalaya secara eksternal arsip tersebut masih utuh dan kini sudah banyak di konversi ke bentuk digital guna menghindari kerusakan, arsip tersebut di scan dalam bentuk pdf dan masih terlihat jelas tidak ada tulisan yang hilang. Dari segi internal arsip tersebut berisi tentang sejarah berdirinya Partai Persatuan Pembangunan di Tasikmalaya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumber tersebut merupakan sumber asli. Dan sumber tersebut merupakan sumber Primer.
- h) Akta pendirian Partai persatuan pembangunan secara eksternal arsip tersebut masih utuh dan kini sudah banyak di konversi ke bentuk digital guna menghindari kerusakan, arsip tersebut di scan dalam bentuk pdf dan masih terlihat jelas tidak ada tulisan yang hilang, dan masih merupakan tulisan yang dibuat oleh mesin tik. Dari segi internal arsip tersebut berisi tentang akta pendirian Partai Persatuan Pembangunan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumber tersebut merupakan sumber asli. Dan sumber tersebut merupakan sumber Primer.
- i) Visi Misi PPP (AD-ART) PPP secara eksternal arsip tersebut masih utuh dan kini sudah banyak di konversi ke bentuk digital guna menghindari kerusakan, arsip tersebut di scan dalam bentuk pdf dan masih terlihat jelas tidak ada tulisan yang hilang. Dari segi internal arsip tersebut berisi

tentang Visi dan misi serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Partai Persatuan Pembangunan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumber tersebut merupakan sumber asli. Dan sumber tersebut merupakan sumber Primer.

- j) SK Menhukum DPP PPP secara eksternal arsip tersebut masih utuh dan kini sudah banyak di konversi ke bentuk digital guna menghindari kerusakan, arsip tersebut di scan dalam bentuk pdf dan masih terlihat jelas tidak ada tulisan yang hilang. Dari segi internal arsip tersebut berisi tentang Surat keputusan kementerian Hukum dan Ham DPP Partai Persatuan Pembangunan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumber tersebut merupakan sumber asli. Dan sumber tersebut merupakan sumber Primer.
- k) Sk DPC PPP secara eksternal arsip tersebut masih utuh dan kini sudah banyak di konversi ke bentuk digital guna menghindari kerusakan, arsip tersebut di scan dalam bentuk pdf dan masih terlihat jelas tidak ada tulisan yang hilang. Dari segi internal arsip tersebut berisi tentang surat keputusan kepengurusan DPC Partai Persatuan Pembangunan Tasikmalaya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumber tersebut merupakan sumber asli. Dan sumber tersebut merupakan sumber Primer.

2. Majalah

- a) Persada Utama. “*Sekretaris DPC PPP Kota Tasikmalaya Bertemu Hamzah Haz*” edisi 2 Maret 2001, kritik estern majalah ini merupakan suatu majalah yang asli dengan kondisi kertas yang digunakan agak kasar serta berwarna kuning yang masih tersimpan dengan baik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya. Di dalam majalah ini juga masih menggunakan ejaan tulisan yang belum disempurnakan. Sedangkan secara intern artikel tersebut ditulis di dalam majalah ini yang berjudul *Sekretaris DPC PPP Kota Tasikmalaya Bertemu Hamzah Haz*. Dapat dipastikan bahwa sumber ini merupakan sumber primer yang dibutuhkan oleh penulis didalam penelitian ini.
- b) Persada Utama. “*PPP Kota Tasikmalaya Resmi Berpisah Dengan PPP Kab.Tasikmalaya Sebagai Perwujudan pemisahan Wilayah*” edisi 10 Maret 2001, kritik estern majalah ini merupakan suatu majalah yang asli dengan kondisi kertas yang digunakan agak kasar serta berwarna kuning yang masih tersimpan dengan baik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya. Di dalam majalah ini juga masih menggunakan ejaan tulisan yang belum disempurnakan. Sedangkan secara intern artikel tersebut ditulis di dalam majalah ini yang berjudul *PPP Kota Tasikmalaya Resmi Berpisah Dengan PPP Kab.Tasikmalaya Sebagai Perwujudan pemisahan Wilayah*. Dapat

dipastikan bahwa sumber ini merupakan sumber primer yang dibutuhkan oleh penulis didalam penelitian ini.

- c) Persada Utama. *“Hamzah Haz Tegaskan PPP di Kota Tasikmalaya bisa berkembang setelah lepas dari Kabupaten Tasikmalaya.”* edisi 12 Maret 2001. Kritik estern majalah ini merupakan suatu majalah yang asli dengan kondisi kertas yang digunakan agak kasar serta berwarna kuning yang masih tersimpan dengan baik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya. Di dalam majalah ini juga masih menggunakan ejaan tulisan yang belum disempurnakan. Sedangkan secara intern artikel tersebut ditulis di dalam majalah ini yang berjudul *Hamzah Haz Tegaskan PPP di Kota Tasikmalaya bisa berkembang setelah lepas dari Kabupaten Tasikmalaya*. Dapat dipastikan bahwa sumber ini merupakan sumber primer yang dibutuhkan oleh penulis didalam penelitian ini.

3. Buku

- a) Penilaian buku yang berjudul “Peta Islam Politik Pasca Soeharto” karangan Zainal Abidin Amir. Buku ini merupakan buku yang membahas bagaimana perkembangan peta politik khususnya partai politik yang berasaskan Islam pasca runtuhnya orde baru. Kritik ekstern buku ini merupakan salah satu sumber yang dibutuhkan karena berkaitan dengan Perkembangan Partai Persatuan Pembangunan. Penulis mendapat buku ini berupa buku aslinya yang didapat dari

perpustakaan daerah Provinsi Jawa Barat, yang diterbitkan oleh pustaka LP3ES 2003. Artinya di mana buku tersebut diterbitkan sezaman terhadap apa yang sedang dikaji oleh penulis. Jika dari segi kritik intern buku ini, terbukti bahwa di dalam tulisan yang dipaparkannya merupakan suatu gambaran objektif, serta ungkapan secara menyeluruh. Sehingga dapat dipastikan bahwa buku ini merupakan sumber Sekunder yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini.

- b) Penilaian terhadap buku “Politik Islam Politik Pergulatan Politik PPP Menjadi Partai Islam” karya Abdul Aziz. Buku ini merupakan buku yang membahas bagaimana peralihan ideologi partai PPP dari asas pancasila kembali lagi menjadi asas yang berideologi Islam serta bagaimana konsekuensi yang ditanggung PPP ketika kembali menjadi partai Islam yang dipandang dari segi etika politik ataupun sosial. Kritik ekstern buku ini merupakan salah satu sumber yang dibutuhkan karena berkaitan dengan Perkembangan Partai Persatuan Pembangunan. Penulis mendapat buku ini berupa buku aslinya yang didapat dari perpustakaan daerah provinsi Jawa Barat, yang diterbitkan Ombak, 2014. Artinya di mana buku tersebut diterbitkan sezaman terhadap apa yang sedang dikaji oleh penulis. Jika dari segi kritik intern buku ini, terbukti bahwa di dalam tulisan yang dipaparkannya merupakan suatu gambaran objektif, serta ungkapan secara menyeluruh. Sehingga dapat

dipastikan bahwa buku ini merupakan sumber Sekunder yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini.

- c) Penilaian terhadap buku “*Pluralitas Parpol Islam Dalam Era Reformasi*” karya Deni Nofriansyah. Buku ini merupakan buku yang membahas bagaimana Pluralitasnya partai partai yang berideologi Islam (Agama) dalam era Reformasi. Kritik ekstern buku ini merupakan salah satu sumber yang dibutuhkan karena berkaitan dengan Perkembangan Partai Persatuan Pembangunan. Penulis mendapat buku ini berupa buku aslinya yang didapat dari Perpustakaan Nasional yang diterbitkan Buku Tujju, 2012. Artinya di mana buku tersebut diterbitkan sezaman terhadap apa yang sedang dikaji oleh penulis. Jika dari segi kritik intern buku ini, terbukti bahwa di dalam tulisan yang dipaparkannya merupakan suatu gambaran objektif, serta ungkapan secara menyeluruh. Sehingga dapat dipastikan bahwa buku ini merupakan sumber Sekunder yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini.

3. Interpretasi

Interpretasi ialah tahap menafsirkan ataupun memberikan makna terhadap fakta-fakta (*facts*) ataupun bukti- bukti sejarah (*evidences*). Perihal ini dibutuhkan sebab pada dasarnya bukti-bukti sejarah bagaikan saksi (*witness*) kenyataan di masa lalu hanyalah sebagai saksi-saksi isu belaka.⁵⁹ Sedangkan menurut

⁵⁹ Daliman. *Metode Penelitian Sejarah*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2012), hlm. 81.

pernyataan Sulasman (2014: 107), interpretasi merupakan tahapan dalam menguraikan sebuah fakta-fakta sejarah serta kepentingan topik sejarah dan menjelaskan suatu permasalahan kekinian.⁶⁰

Interpretasi sejarah menurut Abdurrahman, pada prosesnya seseorang sejarawan harus bisa berusaha mencapai pengertian dari faktor-faktor yang dapat menimbulkan terbentuknya suatu kejadian. Data-data dan fakta-fakta sejarah terkadang memiliki beberapa sebab yang dapat menolong dalam mencapai hasil dari berbagai bentuk. Meskipun suatu sebab bisa mengantarkan pada hasil yang mungkin bertentangan dilingkungan lain. Oleh sebab itu, interpretasi bisa dilakukan dengan metode memperbandingkan informasi berupa data dan fakta untuk menyingkapi sebuah peristiwa- peristiwa yang sedang atau telah terjadi pada satu waktu yang sama. Jadi, cara untuk mengetahui dari sebab-sebab dalam suatu kejadian sejarah ini dibutuhkan pengetahuan mengenai masa lalu, sehingga disaat melakukan penelitian seorang peneliti harus dapat mengenali situasi, tindakan, pelaku, serta tempat peristiwa itu.⁶¹

Interpretasi maupun penafsiran sejarah kerap disebut sebagai analisis sejarah. Analisis serta sintesis ialah dua hal yang sangat berarti dalam tahapan interpretasi. Analisis ialah penguraian terhadap kenyataan yang didapatkan, serta analisis juga bertujuan untuk melaksanakan penafsiran atas fakta yang diperoleh

⁶⁰ Sulasman, *Mertode Penelitian Sejarah...*, hlm. 107.

⁶¹ Sulasman, *Mertode Penelitian Sejarah...*, hlm.113.

sebelumnya dari sumber sejarah bersama dengan teori yang disusun menjadi interpretasi.⁶² Sebaliknya sintesis merupakan proses menyatukan seluruh fakta yang sudah diperoleh sehingga bisa tersusun suatu kronologis kejadian dalam sebuah bentuk rekonstruksi sejarah.

Dalam mempraktikkan konsep tersebut, penulis berupaya untuk menafsirkan sebuah fakta-fakta yang sudah terkumpul tersebut serta berupaya melaksanakan distansiasi (*penjarakan*) yang bertujuan untuk meminimalisir tingkat subyektifitas. Di dalam hubungannya terhadap judul yang diambil, yang pada intinya mengenai.⁶³ **“Perkembangan Organisasi Partai Persatuan Pembangunan di Kota Tasikmalaya 2001-2018”**

Tahap-tahap yang sudah dilalui ini menjadi sebuah landasan terhadap penyusunan kerangka teoritis yang memiliki fungsi untuk memberikan sebuah jawaban terhadap suatu permasalahan serta untuk memberikan arah dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini teori yang digunakan penulis yakni menggunakan teori Ibnu Khaldun Sosiologi Politik tentang Ashabiyah mengenai Perkembangan Negara karena menurut beliau Sejarah adalah salah satu disiplin ilmu yang dipelajari secara luas oleh bangsa-bangsa dan generasi-generasi. Pada permukaannya sejarah tidak lebih dari pada sekedar keterangan tentang peristiwa-peristiwa politik, negara-negara dan kejadian-kejadian masa lampau. Ia tampil

⁶² Daliman. *Metode Penelitian Sejarah*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2012), hlm. 82.

⁶³ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013). hlm.103-104.

dengan berbagai bentuk ungkapan dan perumpamaan. Sedangkan pada hakikatnya terkandung pengertian observasi dan usaha mencari kebenaran, keterangan yang mendalam tentang sebab dan asal benda atau wujud, serta pengertian dan pengetahuan tentang substansi, esensi dan sebab-sebab terjadinya peristiwa. Dimana Konsep Ashabiyah ini menurutnya, munculnya sebuah kerajaan (Negara) dimulai dari solidaritas Ashabiyah (kelompok). Hampir seluruh kerajaan (Negara) di dunia Islam berasal dari bani atau keluarga besar, atau suatu kelompok, meski solidaritas kesukuan atau kelompok cukup berpengaruh dalam perjalanan sejarah sehingga Ibnu Khaldun menyatakan bahwa solidaritas terkuat didasarkan pada agama.⁶⁴ Serta menurut Muhammad Mahmud Rabie Ashabiyah merupakan suatu jalinan sosial yang dapat membangun kesatuan suatu bangsa, terlepas apakah itu dipengaruhi oleh ikatan kekeluargaan maupun persekutuan. Dalam peran sosial, 'ashabiyah' dapat melahirkan persatuan yang dapat dibagi ke dalam dua kelompok. *Pertama*, menumbuhkan solidaritas kekuatan dalam setiap jiwa kelompok. *Kedua*, keberadaan 'ashabiyah' dapat mempersatukan berbagai 'ashabiyah yang bertentangan, sehingga menjadi suatu kelompok yang lebih besar dan utuh.⁶⁵

⁶⁴ Ajid Thohir dan Ahmad Sahidin, *Filsafat Sejarah Profetik, Spekulatif dan Kritis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019. Hlm 75

⁶⁵ Muhammad Mahmud Rabie', *The Political Theory of Ibnu Khaldun*, (Leiden: E. J. Brill, 1967), hlm. 165.

Jika dihubungkan dengan penelitian ini, yaitu Perkembangan Organisasi PPP di Kota Tasikmalaya 2001-2018, maka dapat dikatakan bahwa perkembangan partai persatuan pembangunan ini mengalami pasang surut dari awal berdirinya ditingkat pusat maupun ditingkat daerah pada tahun 1973. PPP yang awalnya tergabung dalam partai Islam masa orde baru akhirnya pada tahun 1973 memisahkan diri dan menjadi partai yang independent terpisah dari partai sebelumnya, sehingga pada masa orde baru partai politik di Indonesia disederhanakan menjadi 3 partai politik saja yaitu, Golkar, PDI Perjuangan dan PPP, akan tetapi lambat laun dalam tubuh PPP mengalami perpecahan dimana Amien Rais memisahkan diri dan membuat partai baru yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan menyatakan diri mundur dari PPP, sehingga pada akhirnya pasca reformasi setelah tumbang rezim soeharto PPP kembali mengembangkan asas keislaman partainya hingga ke daerah-daerah salah satunya ke Tasikmalaya

Adapun untuk Perkembangan Partai Persatuan Pembangunan ini dari periode ke periode selalu mengalami perubahan tatanan keorganisasian partainya mulai dari struktur organisasinya, program kerja, kaderisasi, perolehan suara dan kursi, tidak terkecuali dalam hal pemilu Partai Persatuan Pembangunan di Tasikmalaya selalu memperoleh suara yang banyak dan selalu unggul dalam pemilu di Tasikmalaya, baik Kabupaten maupun Kota sehingga tidak heran lagi jika Tasikmalaya merupakan basis terbesar Partai Persatuan Pembangunan di Jawa Barat maupun di Indonesia. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dapat berkuasa

di Tasikmalaya tidak terlepas dari peranan para ulama yang dimana peran ulama ini sangat berpengaruh bagi masyarakat di mana Tasikmalaya sering terkenal dengan julukan Kota santri di mana nilai keagamaan dan ketaqwaan di Tasikmalaya ini sangat dipandang penting sehingga Partai Persatuan Pembangunan yang berbasis Islam, dengan mudah dapat mengambil hati masyarakat Tasikmalaya ditambah lagi dengan sikap keterbukaan PPP kepada masyarakat Tasikmalaya. Hal ini membuktikan bahwa Partai Persatuan Pembangunan ini sangat berkuasa di Tasikmalaya baik dalam pemilu Kabupaten maupun Kota yang di mana di Kabupaten Tasikmalaya PPP berhasil memenangkan Pemilihan Bupati dengan kemenangan UU Ruzhanul Ulum sebagai Bupati terpilih Kabupaten Tasikmalaya, begitu pun dengan Kota Tasikmalaya di mana PPP kembali menguasai Pemilihan Wali Kota Tasikmalaya dengan kemenangan Budi Budiman sebagai Wali Kota Tasikmalaya yang dimana Budi Budiman ini sebelumnya merupakan Ketua DPC PPP Tasikmalaya 2 Periode 2011-2016 dan 2016-2021 akan tetapi akibat kemenagannya sebagai Wali Kota Tasikmalaya maka beliau mengundurkan diri dari jabatan ketua DPC PPP Tasikmalaya dan digantikan oleh wakilnya yakni Zezen Jaenudin yang naik sebagai Ketua DPC PPP Tasikmalaya.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan penulis banyak sekali menemukan fakta fakta baru, bahwasanya Partai Persatuan Pembangunan ini tetap menjadi partai yang unggul di wilayah Tasikmalaya baik di Kabupaten ataupun Kota

sehingga Tasikmalaya merupakan basis terkuat Partai Persatuan pembangunan dan merupakan aset terpenting bagi Partai Persatuan Pembangunan itu sendiri.

4. Historiografi

Tahap akhir dalam sebuah metode penelitian sejarah ialah tahapan historiografi (penulisan sejarah). Historiografi merupakan proses penyusunan dari fakta sejarah yang didapat dari berbagai sumber yang sudah dipilih dan diseleksi dalam suatu bentuk penulisan sejarah. Sehingga dengan demikian tahap historiografi merupakan tahap lanjutan dari tahap interpretasi yang setelah itu hasilnya dituliskan menjadi sebuah kisah atau cerita yang menarik. Apabila dilihat dari tahapan ini tidaklah mengherankan jika dikatakan bahwa dari kerja seseorang sejarawan untuk menciptakan suatu karya ilmiah yang sangat bernilai historis.⁶⁶ Dalam tahapan ini, seluruh informasi yang sudah terkumpul serta sudah melewati tahapan kritik serta pentafsiran, setelah itu ditulis menjadi suatu cerita, kisah ataupun kejadian sejarah yang sejalan dengan sumber serta informasi yang sudah terhimpun dengan memakai jenis penulisan deskriptif naratif.⁶⁷ Serta dalam proses penyusunannya, penulis sangat berharap dapat menciptakan serta mengungkapkan kenyataan-kenyataan berupa fakta baru untuk merekonstruksi sejarah. Ada pula sistematika penyusunan skripsi ataupun penelitian sejarah ini yang akan dibahas sebagai berikut:

⁶⁶ Herlina, Nina Lubis, *Metode Sejarah...*, hlm.55.

⁶⁷ Daliman. *Metode Penelitian Sejarah*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2012), hlm. 84.

Bab I penulis disini akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka serta metode atau langkah-langkah penelitian seperti (heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi). Dalam bab ini penulis berupaya untuk mengarahkan pembaca pada tahap-tahap atau langkah-langkah penelitian sebagai suatu pijakan dalam pembahasan berikutnya.

Bab II membahas mengenai bagaimana Sejarah Berdirinya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) baik di tingkat Nasional, tingkat Provinsi maupun di tingkat lokal, kondisi sosial politik Tasikmalaya, Visi Misi PPP serta kiprah PPP di Tasikmalaya, keterlibatan ulama dalam kesuksesan PPP di Kota Tasikmalaya.

Bab III menguraikan tentang Bagaimana perkembangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dimulai dari periode pertama hingga periode ke empat dalam setiap periode membahas, Struktur kepengurusan, Program partai, Kaderisasi atau Keanggotaan, Hasil perolehan suara dan kursi, Kontibusi ulama dan Respon masyarakat.

Bab IV disini penulis akan meguraikan kesimpulan. Yang dimana kesimpulan disini bertujuan untuk menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan yang penulis kaji di dalam bab kedua dan ketiga. Setelah selesai menyimpulkan, maka penulis akan menguraikan dan menjajakan daftar sumber atau yang sering dikenal dengan daftar pustaka.